

PERAN STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGELOLA KEKAYAAN INTELEKTUAL UNTUK MEMAJUKAN POTENSI UNGGULAN DAERAH

ERNY TRISNIAWATY

WEBINAR KEKAYAAN INTELEKTUAL
JAKARTA, 28 MARET 2024

PENGERTIAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Kekayaan Intelektual adalah perlindungan hukum atas hasil-hasil kreasi dari pikiran (karya intelektual) manusia, yang mencakup invensi; karya sastra dan seni; desain; dan simbol, nama dan gambar yang digunakan dalam perdagangan.



MENGAPA KEKAYAAN INTELEKTUAL BUTUH DILINDUNGI?



ARTI PENTING PELINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL



Sebagai jaminan kepastian hukum & kepastian berusaha;



Sebagai asset bisnis intangible yang bernilai ekonomi tinggi;



Sebagai alat untuk menciptakan/menambah nilai/*value added* ;



Sebagai sumber bisnis baru melalui invensi & inovasi;



Sebagai tanda pengenal agar mudah dikenali oleh konsumen (*brand image*) & alat promosi;



Sebagai alat untuk meningkatkan posisi tawar perusahaan dalam dunia perdagangan & investasi.

BENTUK KEKAYAAN INTELEKTUAL

KI KOMUNAL

Sumber Daya Genetik
Ekspresi Budaya Tradisional
Pengetahuan Tradisional
Indikasi Geografis



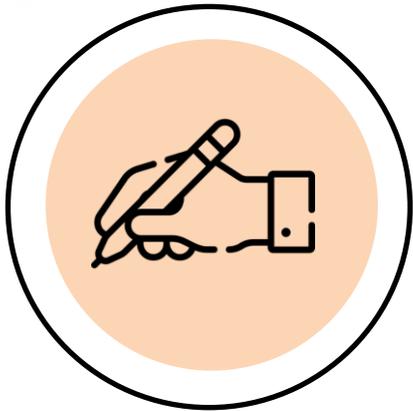
KI PERSONAL



- Hak Cipta dan Hak Terkait**
- Hak Milik Industri**
- Paten
 - Rahasia Dagang
 - Merek
 - Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
 - Desain Industri
 - Perlindungan Varietas Tanaman



4 PILAR UTAMA KEKAYAAN INTELEKTUAL



**Penciptaan
Karya Intelektual**



**Perolehan
Pelindungan KI**

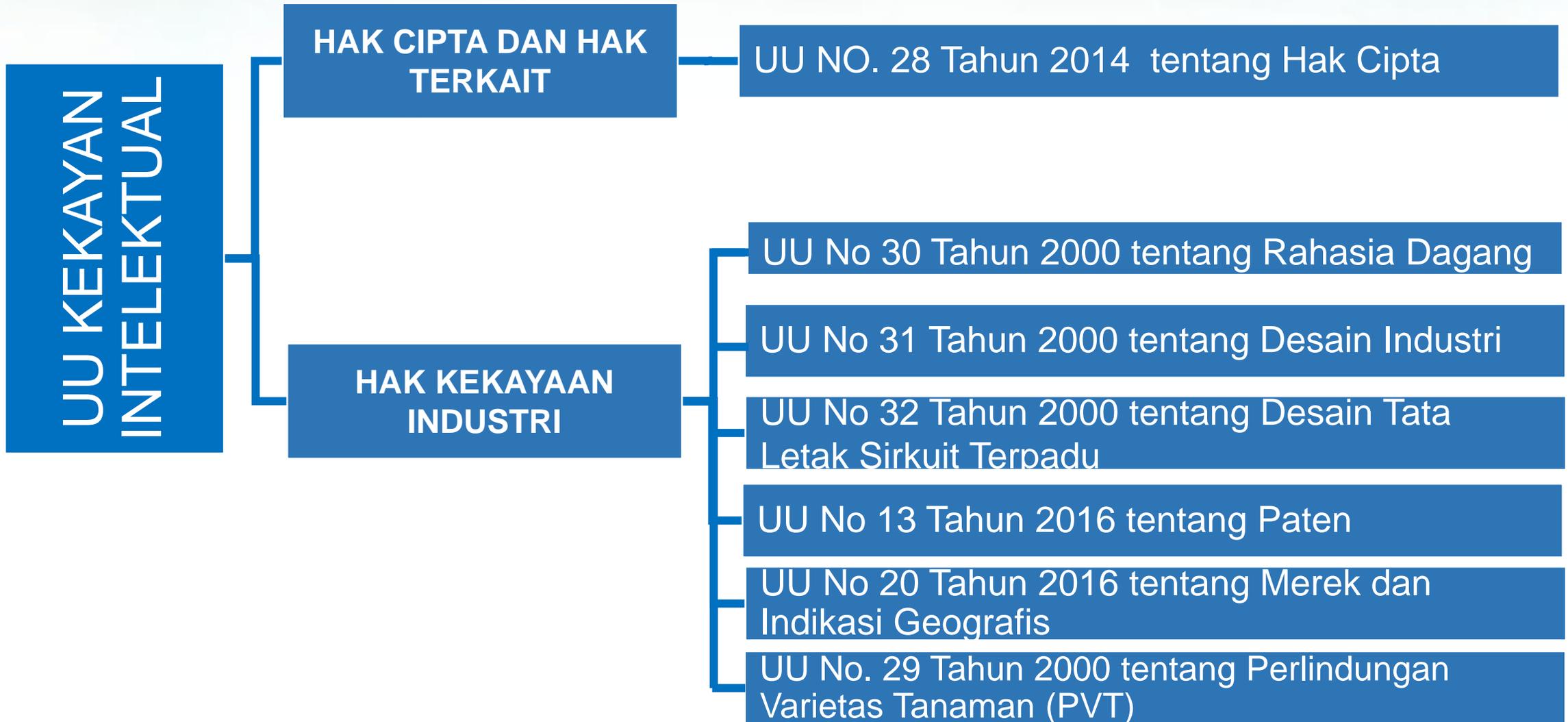


Penegakan Hukum



**Komersialisasi
KI**

UNDANG-UNDANG DI BIDANG KI



SISTEM PELINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Terdiri dari Hak Ekonomi dan Hak Moral;
2. Umumnya menganut sistem ***“first to file”***, kecuali **Hak Cipta (*first to publish*)**;
3. Diberikan berdasarkan atas **permohonan**, kecuali **Hak Cipta & Rahasia Dagang**;
4. Ada jangka waktu pelindungannya;
5. Merupakan hak kebendaan sehingga bisa beralih atau dialihkan; (SK berlaku)
6. Pelindungannya bersifat ***national territorial*** (wilayah hukum NKRI).

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL 2020-2024 KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL

Pusat Data KI Komunal



PUSAT DATA
KEKAYAAN INTELEKTUAL
KOMUNAL INDONESIA

Beranda | Layanan Online Trademark | Pengurusan Trademark | Berita-berita (Berita) | Berita (Garis Berita)

Cari Data KI Komunal:

Untuk Informasi
Anda:

Indonesia mempromosikan sumber daya alamnya sebagai Kekayaan Intelektual Komunal. Apa itu kekayaan yang baru, apa itu...

Nias
Nias
Nias

Jorong
Jorong
Jorong

Nyangku
Nyangku
Nyangku



Pemanfaatan KI Komunal dan Pariwisata (IP & Tourism)

- 01 KIK dapat membuka potensi pemulihan ekonomi nasional bagi sektor pariwisata dalam bentuk keterkaitan antara KI dan Pariwisata atau *IP and Tourism*.
- 02 Potensi *ecotourism* sudah dikembangkan oleh negara Eropa dalam mempromosikan sekaligus mengembangkan potensi ekonomi dari produk Indikasi Geografis.
- 03 Potensi KIK dapat menjadi rantai *booster* pariwisata memerlukan strategi branding dan marketing yang tepat.
- 04 Sinergi dan kolaborasi seluruh stakeholder menjadi sangat penting, karena dukungan dari jajaran pemerintahan terkait perekonomian, perdagangan, serta pariwisata menjadi faktor kunci.
- 05 Pelindungan Kekayaan Intelektual Komunal khususnya Indikasi Geografis (IG) yang optimal seharusnya dapat memberdayakan sumber daya alam dan manusia di daerah.

PENGUSAHA & INDIKASI GEOGRAFIS

Perkembangan setelah IG terdaftar

Sebelum IG Rp 60ribu/kg  Sesudah IG: Rp 120ribu/kg

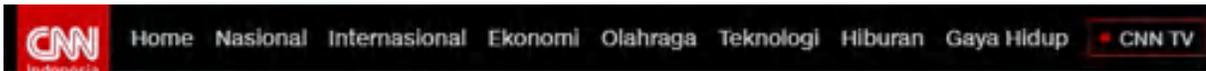


Peningkatan
Tenaga Kerja

40 klpk. Keja
menjadi
60 klpk. kerja

1.750 karyawan
menjadi
2.640 karyawan

PENGUSAHA & KI + PARIWISATA



Melangkah di Kebun Kopi Kintamani

CNN Indonesia | Rabu, 07/11/2018 20:09 WIB

Bagikan :  



Proses menyangrai kopi di Satria Agrowisata. (CNN Indonesia/Ardita Mustafa)



PENGUSAHA & KI + PARIWISATA

LintasGAYO.co

Homepage » Keber Ari Gayo »

Kini di Takengon Ada Wisata dan Nginap di Kebun Kopi

13/08/2018



Buyer kopi dari Royal Coffee USA bersama petani kopi Gayo anggota Koperasi Kabara

TAKENGON-LintasGAYo.co : Agrowisata khususnya kopi di Dataran Tinggi Gayo khususnya di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah mulai menunjukkan kemajuan.

Festival Garam Amed Dikemas Jadi Paket Wisata

02 Oct 2019 13:42:20 992

Festival Garam Amed Garam Kecamatan Abang



NusaBali.com -
Produksi garam Amed lokasi Festival Garam Amed 2019, Banjar Lebah, Desa Purwakerthi, Kecamatan Abang, Karangasem, Selasa (1/10). -NANTRA

Empat Pilar Pembangunan Kekayaan Intelektual



DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

- Diseminasi Informasi KI
- Peran Dit KSP & Sekretariat (Humas)
- Peran KL/Non KL Terkait
- Peran Sentra HKI
- Dukungan Lembaga Penyiaran (Publik/Swasta)

**Penciptaan
Karya
Intelektual**

- Pemantauan/Pengaduan Pelanggaran
- Peran Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa
 - Bareskrim Polri
- Institusi Terkait Lainnya

**Penegakan
Hukum**

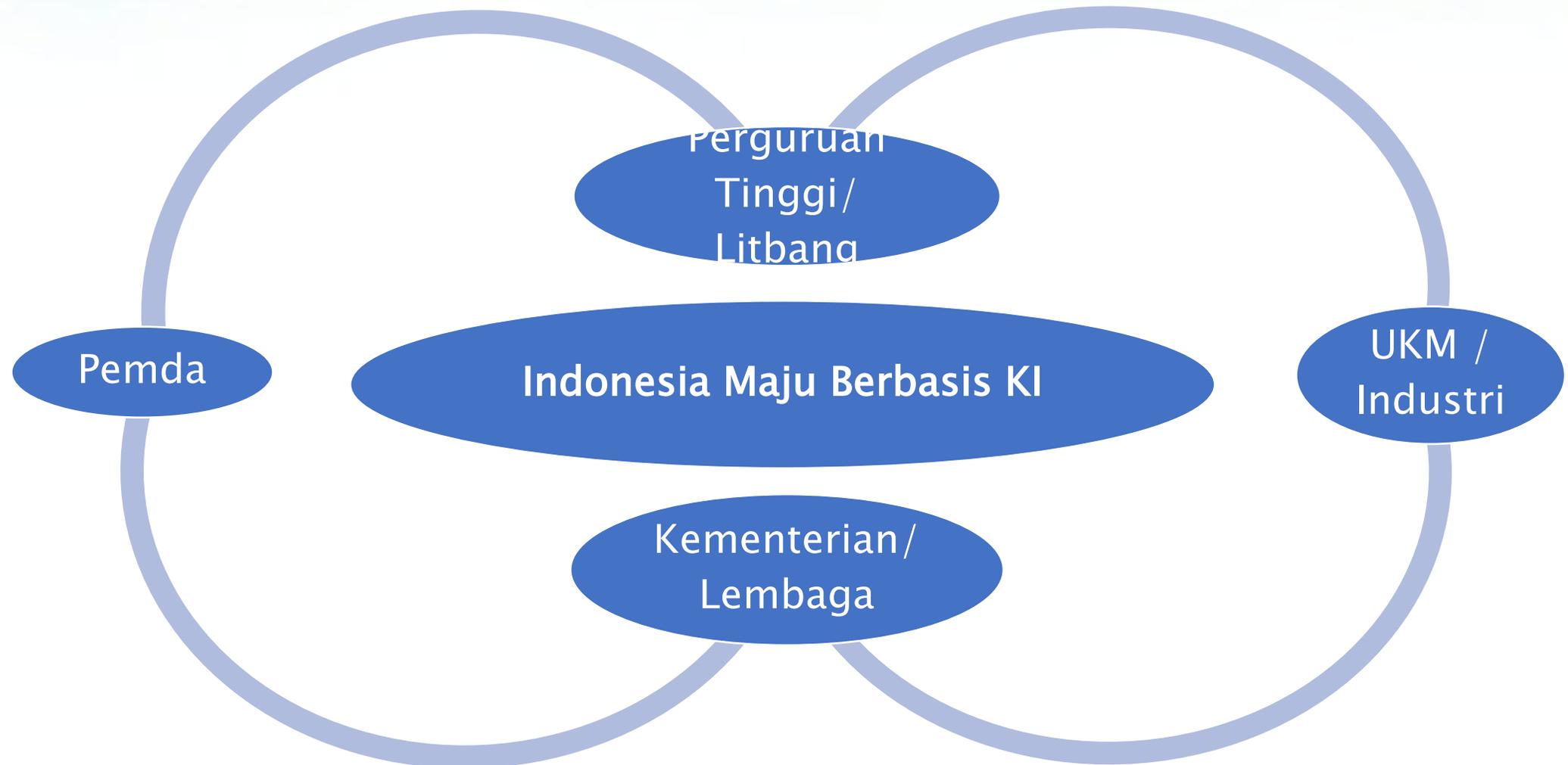
- Kualifikasi SDM Handal
- Kualitas Hasil Pemeriksaan Substantif yang terstandard
- Dukungan Sistem TI
- Kecepatan Penyelesaian Permohonan

**Perolehan/
Pelindungan
HKI**

- Peran Direktorat Teknis
- Peran KL/Non KL Terkait
 - Klinik KI (IP *Clinic*)
 - Valuasi KI (IP *Valuation*)
 - Pasar KI (IP *Marketplace*)

Komersialisasi

KI ADALAH TUGAS BERSAMA



KOLABORASI DALAM Mendukung KI Membangun Ekonomi

(Skema "Quattro Helix")

University

- Pelaksana Riset
- Kompetensi dalam Pengembangan Inovasi
- Menghasilkan Produk Teknologi

Financial Inst.

Memberikan skema pendanaan yang sesuai untuk pengembangan teknologi, pelaku usaha baru



Government

- Memberikan komitmen yang jelas dalam pembangunan ekonomi berbasis Kekayaan Intelektual
- Memberikan dukungan kebijakan, aturan, dan kelembagaan dan aparat

Industry

- Pelaksana pengembangan teknologi lebih lanjut
- Sebagai penyumbang sumber daya manusia
- Pelaku usaha dari teknologi



DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAM R.I.

Pentingnya UMKM Melek Hukum Kekayaan Intelektual

Kesadaran pelaku UMKM **masih rendah** melindungi kekayaan intelektual usahanya yang dapat menjadi aset bernilai

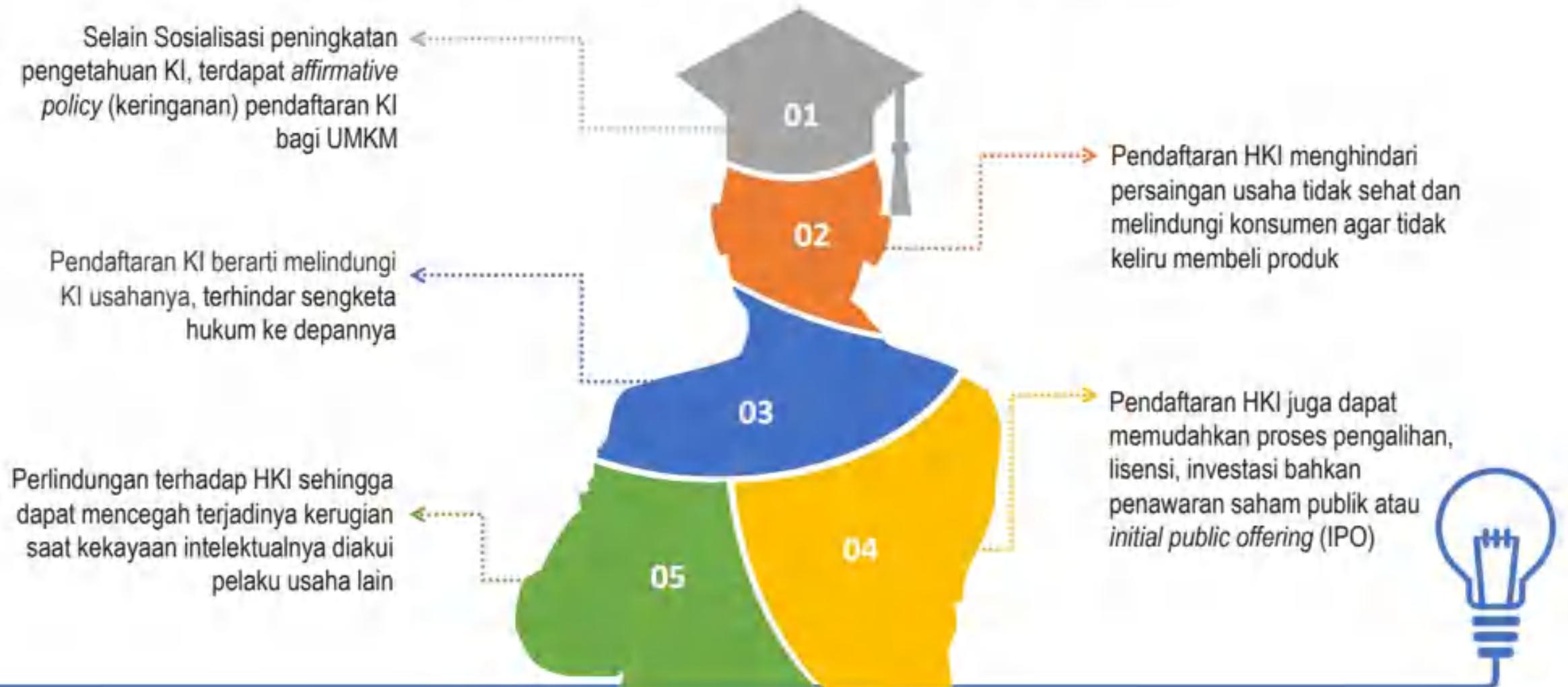


Kekuatan UMKM bukan pada kekuatan modal tapi **kreativitasnya**, ini yang harus **dilindungi**



Potensi UMKM berkembang hingga menjadi bisnis skala besar, pelaku UMKM harus menyiapkan **aspek penting yaitu perlindungan hukum** pada hak kekayaan intelektual

Kekayaan Intelektual bagi UMKM



Rencana Strategi dan Rencana Aksi Dukungan Hak Kekayaan Intelektual

Arah Kebijakan/Kegiatan	Sasaran/Target	Jadwal	Instansi Penanggung Jawab/Terkait
a) Percepatan pemetaan potensi ekonomi KIK yang dapat dikembangkan			
<ul style="list-style-type: none"> Percepatan inventarisasi badan/lembaga riset yang ada 		Jangka pendek-menengah	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Kemenkumham Pemerintah Daerah
<ul style="list-style-type: none"> Percepatan inventarisasi lembaga/instansi yang berkepentingan terhadap pembangunan KI 		Jangka pendek-menengah	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Kemenkumham Pemerintah Daerah
<ul style="list-style-type: none"> Percepatan inventarisasi dan identifikasi data yang terkait dengan potensi KI 		Jangka pendek-menengah	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Kemenkumham Pemerintah Daerah
b) Penguatan fasilitasi dan sosialisasi terkait KI			
<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi/pendampingan pendaftaran KI melalui kerjasama dengan Kanwil Kemenkumham 		Jangka pendek-menengah	<ul style="list-style-type: none"> Kemenkumham Pemerintah Daerah
<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi/diseminasi/edukasi pelaku ekraf/UMKM tentang perlindungan KI 		Jangka pendek-menengah	<ul style="list-style-type: none"> Kemenkumham Kementerian KUKM Pemerintah Daerah
c) Percepatan pengembangan skema penjaminan aset HKI dan pembiayaan UMKM yang dilindungi KI		Jangka menengah-panjang	<ul style="list-style-type: none"> Kemenkumham Bank Indonesia KemenKUMKM Kemenparekraf OJK
d) Penerapan kemudahan prosedur dan tarif pengurusan HKI khusus UMKM sebagaimana amanat UU CK			
<ul style="list-style-type: none"> Konsisten dalam memberikan kemudahan dalam memperoleh HKI secara cepat, tepat, murah dan tidak diskriminatif 		Jangka pendek-menengah	<ul style="list-style-type: none"> Kemenkumham
<ul style="list-style-type: none"> Penguatan pendampingan dalam memperoleh HKI 		Jangka pendek-menengah	<ul style="list-style-type: none"> Kemenkumham

Rencana Strategi dan Rencana Aksi Dukungan Hak Kekayaan Intelektual

Arah Kebijakan/Kegiatan	Sasaran/Target	Jadwal	Instansi Penanggung Jawab/Terkait
e) Pengembangan wisata berbasis KIK		Jangka menengah-panjang	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenparekraf • BRIN • Pemerintah Daerah
f) Optimalisasi sistem TI dalam peningkatan layanan hukum KI dan portal informasi KI sebagai pusat pengetahuan dan rujukan terkait KI			
<ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan sistem TI dalam peningkatan layanan hukum KI dan portal informasi KI 		Jangka pendek-menengah	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenkumham
<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat inovasi yang bisa dilakukan sistem TI dalam peningkatan layanan hukum KI dan portal informasi KI 		Jangka pendek-menengah	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenkumham
g) Penguatan penegakan hukum pelanggaran KI			
<ul style="list-style-type: none"> • Memperbanyak jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kantor Wilayah Kemenkumham 		Jangka pendek-menengah	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenkumham
<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan pelatihan calon PPNS agar dapat menangani kasus pelanggaran KI 		Jangka pendek-menengah	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenkumham
<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan layanan penanganan pengaduan pelanggaran KI 		Jangka pendek-menengah	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenkumham

TERIMA KASIH

<https://www.dgip.go.id>